
INTERNATIONAL CONFERENCE OF MOSLEM SOCIETY

ISSN 2622-5840, Volume 1, 2016, Pages 124-135

DOI: <https://doi.org/10.24090/icms.2016.2409>

Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN

Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

Sri Winarsih

Alumni S3 UPI Bandung, Indonesia

winarsih2014@yahoo.co.id

Abstract: Policy has always been associated with the public. Public Policy (English: Public Policy) is a binding decisions for the crowds at the strategic level or nature outline made by the authorities publik. Sedangkan management is an overall process for carrying out a job through other people carried out by two people or more to achieve a common goal that has been determined or decided in advance. So management is an organization's governing instrument. Financing education can be interpreted simply as a cost to be available and required in conducting education in order to achieve the vision, mission, goals, objectives, and strategisnya. Pembiayaan the education required for the procurement of buildings, infrastructure and equipment, tutoring, teacher salaries, employee salaries and on. Therefore, in improving the quality of education is need for continuous quality improvement (continuous quality improvement), it is a formula or approach that is supposed to be one paradigm School Based Management (SBM), Through continuous quality improvement approach is expected to address the problem low quality of education that is not only counting on the conventional approach, but needed an approach in order to optimize resources and dana. Hal it is intended to achieve the objectives in an effective, efficient, creative and innovative oriented quality improvement (quality) .Arah quality improvement approach led the school to recognize and implement Total Quality Management (TQM). TQM is an integrated quality management performed by each level of management and the inside of the institutional system / organization with the goal to provide satisfactory services to the customer / user (customer) It so every school should optimize the management to increase the coverage mutu. Empat the school management success , namely: (1) .Siswa satisfied with the service of the school, (2) .The parents were satisfied with the service to their children, (3) .Pihak users satisfied because graduates receive graduate with kualitastinggi and according to expectations. (4) .guru and employees are satisfied with the services of the school in the form: the division of labor, the relationship and communication between teachers / leaders, employees, salary / honoraria and services.

Keywords: *policy, finance, quality education, school*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan pun dan di manapun berada. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Hal ini membuktikan adanya

langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalanya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas

dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan¹.

Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing

sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana².

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah Pendidikan yang murah dan berkualitas, namun Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan kedaerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah³.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan manajemen pembiayaan di sekolah dengan optimal dapat meningkatkan mutu sekolah. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa masadepan suatu bangsa terletak pada mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

Untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan, diperlukan perhatian yang serius, baik oleh penyelenggara pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Sebab, dalam sistem pendidikan nasional sekarang ini, konsentrasinya terhadap mutu dan kualitas bukan semata-mata tanggungjawab sekolah dan pemerintah, tetapi merupakan sinergi antara berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan

¹Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.77

²E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.48

³E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.193

kegiatan yang sistematis dan terencana dalam bentuk manajemen mutu.

Manajemen mutu dalam pendidikan merupakan cara dalam mengatur semua sumber daya pendidikan, yang diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan jasa yang sesuai bahkan melebihi harapan “pelanggan pendidikan”.

Dengan paradigma kebijakan pemerintah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan keniscayaan yang harus dilakukan secara “*terencana, terarah, intensif, efektif, efisien, dan produktif*” dalam proses pembangunan. Urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadikan pemerintah bersama kalangan swasta bersama-sama telah dan terus berupaya mewujudkannya melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas.

Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar kita dapat memasuki era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang sehat dan berkualitas. Dimana eksistensi sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu Peningkatan kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu sekolah agar dapat survive dalam era global. TQM (*Total Quality Management*) atau yang biasa kita kenal dengan Manajemen Mutu Terpadu

merupakan konsep peningkatan mutu secara terpadu di bidang manajemen. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu terhadap sekolah adalah karena kurang optimalnya manajemen sekolah, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta masih banyak SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang belum sarjana atau belum memenuhi syarat. Penulis berasumsi bahwa “*mainstreamnya*” adalah pada aspek manajemen sekolah itu sendiri. Berangkat dari asumsi itulah kemudian penulis berhipotesis bahwa dengan perbaikan manajemen dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

B. Pengertian Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan selalu dikaitkan dengan publik (Wikipedia bahasa Indonesia). Kebijakan Publik (*Inggris: Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.⁴

Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya⁵.

Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari

⁴Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang unggul*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hal.115.

⁵Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:

Kencana, 2010), hal. 219.

rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus⁶.

Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sebagaimana tersebut di atas. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya⁷.

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin⁸. Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar yaitu:

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3. Biaya personal yang meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai
 - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang-tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah⁹.

C. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Supandi (1985), biaya pendidikan itu terdiri dari jenis-jenis berikut: *Pertama*, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mencakup gaji guru dan administrator, petugas bimbingan dan penyuluhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, material, tanah, dan bangunan. Biaya tidak langsung mencakup semua ongkos dan pengeluaran yang secara

⁶Ibid

⁷Ibid, hal 220-221

⁸Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya Wacana,1989), hlm. Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya

Wacana, 1989), hlm.130

⁹Redaksi Sinar Grafika, *Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.35-36

tidak langsung dipergunakan untuk kegiatan proses pendidikan seperti penghapusan dan keausan bangunan, pajak yang harus dibayar, dan insentif bagi pegawai. *Kedua*, biaya pribadi dan sosial. Biaya pribadi pendidikan itu adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, alat tulis, angkutan dan pemondokan. Biaya sosial pendidikan ialah biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat, antara lain hasil pemungutan pajak yang dipergunakan untuk pendidikan, sumbangan, atau hibah dari masyarakat. *Ketiga*, biaya moneter dan non moneter. Biaya moneter, yaitu biaya yang berbentuk atau dapat dihitung berdasarkan nilai keuangan. Biaya non moneter, yaitu biaya yang tidak bersifat keuangan, antara lain adalah pendapatan hilang atau kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan (mendapatkan uang) karena mengikuti kegiatan proses pendidikan. Jenis biaya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan, keperluan, dan undang-undang yang berlaku. Secara garis besarnya biaya pendidikan dari pemerintah itu terdiri dari dua jenis, yaitu biaya rutin dan biaya pembangunan. Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara

satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.

3. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

D. Sumber dan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan¹⁰. Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

1. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
2. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
3. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
4. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat,

¹⁰Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2003), hlm.5-6

dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya suka rela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah¹¹.

Sumber dana lain dapat diperoleh melalui:

1. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

2. Zakat

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam

3. *Shodaqoh*

Shodaqoh atau disebut juga *shodaqoh sunnah*, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan di atas

maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

4. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiah. Melihat pengertian hibah, jelas bahwa hibah ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan¹².

Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut:

1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf sebagaimana tersebut di atas.
2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
7. Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh

¹¹Harbangan Siagian, *ibid*, hlm.133

¹²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:

Kalam Mulia, 2002), hal.293-298

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya¹³.

E. Model-Model Biaya Pendidikan

Ada beberapa model biaya pendidikan yang harus difahami oleh satuan pendidikan. Model-model biaya pendidikan tersebut diantaranya adalah:

1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*), merupakan dana bantuan dari pemerintah yang berdasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik.
2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) merupakan dana bantuan dari pemerintah kepada daerah yang yang miskin dan jumlahnya lebih besar daripada dana bantuan yang diberikan kepada daerah yang sudah makmur.
3. Model Perencanaan Pajak jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*), model ini berdasarkan penafsiran per siswa, sehingga penerima bantuan ini akan berbeda di setiap siswa.
4. Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*) merupakan bantuan pemerintah kepada murid-murid dan guru-guru di daerah yang kurang makmur.
5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) model ini merupakan subsidi silang dari pajak daerah yang telah makmur kepada daerah yang masih tertinggal.
6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)
7. Model Sumber Pembiayaan (*the Resources Cost Model*)
8. Model Surat Bukti/penerima (*Models of Choice and Voucher plans*)
9. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*)
10. Model berdasar Pengalaman (*Historic Funding*)

11. Model berdasarkan Usulan (*Bidding Model*)
12. Model berdasarkan Kebijaksanaan (*Descretion Model*)

F. Manajemen Mutu Dalam Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen menurut asal katanya (*etimologis*) berasal dari bahasa latin, *manus+agere*. *Manus* berarti tangan, sedangkan *agere* berarti melakukan. Digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *managere* di terjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda, *management, manager*, untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan¹⁴.

Menurut Syafaruddin (2005:42) mengemukakan bahwa: Manajemen sebagai suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Mutu

Terdapat banyak pengertian tentang mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat, atau kualitas (kepandaian, kecerdasan, dsb).¹⁵ Sementara pengertian lain tentang mutu dikemukakan oleh para ahli dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Diantaranya Edward Deming, mengatakan bahwa mutu adalah: "*apredictive degree of uniformity and dependability at a low cost, suited to the market*". Pendapat lain, seperti yang disampaikan Joseph M. Juran, mutu adalah: "*fitness for use, as judged by the user*". Kemudian Philip B. Crosby, mengatakan "conformance to requirements" dan Armand V. Feigenbaum, mengatakan "*full customer satisfaction*".

Pada hakikatnya beberapa pengertian mutu tersebut adalah sama dan memiliki elemen-elemen sebagai berikut: *pertama*, meliputi usaha memenuhi atau melebihi

¹³Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). hal.229-230

¹⁴Nur Aedi, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Bandung : CV.Pustaka Cendekia Utama, 2012).hal.25

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 786.

harapan pelanggan. *Kedua*, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. *Ketiga*, merupakan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.

Dari beberapa pengertian mutu di atas, dapat penulis simpulkan bahwa secara garis besar, mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan "pelanggan pendidikan". Apabila kata mutu digabungkan dengan kata pendidikan, berarti menunjuk kepada kualitas *product* yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, serta lulusannya relevan dengan tujuan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mutu produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

3. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Ada tiga factor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) Penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik; 3) Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.¹⁶

Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era otonomi daerah yang sedang berjalan maka kebijakan strategis yang diambil Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah: (1).Manajemen mutu berbasis sekolah (*school based management*) dimana sekolah diberi kewenangan untuk

merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2).Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (*community based education*) di mana terjadi interaksi antara sekolah dan masyarakat. Hal ini sangat penting sekali karena akan dapat memudahkan berbagai macam aspek pendidikan baik berupa perencanaan program, pelaksanaan maupun pembiayaannya; (3).Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning* paradigm yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan. Untuk merealisasikan kebijakan di atas maka sekolah perlu melakukan manajemen peningkatan mutu. Manajemen Peningkatan Mutu selanjutnya disingkat MPM ini merupakan suatu model yang dikembangkan di dunia pendidikan, seperti yang telah berjalan di Sedney, Australia yang mencakup: a) School Review, b) Quality Assurance, dan Quality Control, dipadukan dengan model yang dikembangkan di Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. Dan model peningkatan mutu sekolah dasar yang dikembangkan oleh Sukanto, dkk. dari IKIP Yogyakarta.¹⁷

Semua program peningkatan mutu sekolah tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung dana yang memadai baik itu yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun dunia usaha.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Sasaran yang dituju dari manajemen mutu adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja dan peningkatan mutu kerja agar menghasilkan produk yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan.

¹⁶Muwahid Shulhan dan Soim. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 106

¹⁷Hand out *pelatihan calon kepala sekolah*, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, 2000.

Dalam manajemen produksi, ada suatu mekanisme penjaminan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu. Untuk itu pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal perencanaan. Apabila pengendalian mutu dilakukan setelah produk dihasilkan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Dalam paradigma demikian, tujuan utama manajemen mutu adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi, dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan selama proses produksi dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai standar. Dengan demikian, dalam manajemen mutu bukan sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana proses produksi bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan.

Dengan proses produksi yang baik, tentu akan dapat menghasilkan produk yang baik pula. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara ini. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, maupun orang tua/wali murid, sangat berharap agar murid dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, setiap lembaga Pendidikan hendaknya selalu berupaya agar pendidikan yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memuaskan para pelanggan. Praktek penyelenggaraan pendidikan dapat dikiyaskan dengan proses produksi dalam sebuah perusahaan (industri)¹⁸. Hanya saja, produk yang dihasilkan lembaga pendidikan dalam bentuk jasa. Oleh karena itu lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai perusahaan jasa.

Dari prespektif ini, mutu dan kualitas layanan (jasa) yang dihasilkan merupakan ukuran mutu sebuah lembaga pendidikan.

Yaitu sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap jasa yang dihasilkan.

Menurut Mulyasa (2005:26) mengemukakan bahwa: mutu organisasi/lembaga pendidikan dapat diukur dari pelayanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan beserta seluruh karyawan kepada para pelanggan sesuai dengan standar mutu tertentu bukan hanya dalam bentuk kualitas lulusannya. Pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi dan melayani kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pelanggan di sini adalah pelanggan internal, yaitu guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan pelanggan eksternal yaitu peserta didik dan pihak-pihak terkait di luar lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian, sekolah dikatakan bermutu apabila mampu memberi layanan sesuai atau bahkan melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang terkait seperti orang tua, penyandang dana, pemerintah atau dunia kerja pengguna lulusan.

Untuk memberikan jaminan terhadap mutu dan kualitas, lembaga pendidikan harus mengetahui dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Lembaga pendidikan hendaknya selalu berupaya mensinergikan berbagai komponen untuk melaksanakan manajemen mutu pendidikan yang dikelolanya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kependidikan. Untuk itu, kerjasama dengan semua komponen sekolah dalam manajemen harus menjadi prioritas. Komponen sekolah dimaksud adalah para pendidik, karyawan, peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat. Kerjasama dengan komponen sekolah dimaksudkan untuk melibatkan dan memberdayakan mereka dalam proses organisasi baik dalam pembuatan keputusan maupun pemecahan masalah.

Oleh karena itu, pada saat ini telah menggejala hampir di seluruh dunia sebuah cara untuk meningkatkan mutu pendidikan

¹⁸Mohammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). hal.346

yaitu *school based management* yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah¹⁹.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pembaharuan pendidikan, yang memberikan kewenangan penuh kepada madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan lingkungan. Kecuali pemberian kewenangan yang cukup besar tersebut, pelaksanaan MBS juga memberikan beban pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang ada kepada sekolah yang bersangkutan. MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, sehingga menjamin partisipasi semua komponen pendidikan yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong komitmen mereka terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah.

Keberhasilan manajemen mutu dalam dunia pendidikan (sekolah) dapat diukur tingkat kepuasan pelanggan. Sekolah dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan pelanggan.

Menurut Syafaruddin (2005:289) mengemukakan bahwa: empat hal yang merupakan cakupan keberhasilan manajemen sekolah, yaitu :

- a. Siswa puas dengan layanan sekolah, yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan Madrasah atau siswa menikmati situasi sekolah dengan baik.
- b. Orang tua siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, layanan yang diterimanya dengan laporan tentang perkembangan

kemajuan belajar anaknya dan program yang dijalankan sekolah.

- c. Pihak pemakai lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas tinggi dan sesuai harapan.
- d. Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar guru/pimpinan, karyawan, gaji/honor yang diterima dan pelayanan.

4. Pentingnya Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Otonomi Daerah membawa dampak pada pengelolaan pendidikan di daerah, dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu menggali sumber daya dan potensi daerah berbasis keunggulan lokal. Konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari desentralisasi pendidikan tersebut, karena budaya dan potensi daerah yang sangat beragam, adalah lulusan yang bervariasi. Oleh karena itu, upaya standarisasi mutu dan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar mutu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai dengan standar mutu, diperlukan penilaian secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah. Menurut Mohammad Ali (2007:342) mengemukakan bahwa: Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja secara berkesinambungan tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan manajemen, khususnya manajemen mutu sekolah, yang mempunyai tujuan utama mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi, dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang

¹⁹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

dilaksanakan selama proses produksi dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai standar.

Dari paparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa untuk menjamin pelaksanaan standarisasi mutu dan kualitas pendidikan, manajemen mutu mempunyai peranan penting. Sebab, kegiatan dalam manajemen mutu bukan sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana proses produksi bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan agar dapat menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan.

G. Penutup

Dari paparan diatas bahwasanya dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu dikaitkan dengan publik. Kebijakan Publik (*Inggris: Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.
2. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*" Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalny biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.
3. Keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha

pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu di pakai sebaik mungkin.

4. Biaya pendidikan dibagi menjadi: Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, Biaya Pribadi Peserta Didik.
5. Keberhasilan manajemen mutu dalam dunia pendidikan (sekolah) dapat diukur tingkat kepuasan pelanggan. Sekolah dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan "pelanggan pendidikan".

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Dedi Supriadi, 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Depdiknas.2006. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku*. Jakarta: Depdiknas, Departemen Agama
- ,2003.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- ,2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- ,2004. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Harbangan Siagian, 1989. *Administrasi Pendidikan*, Semarang: Satya Wacana.

- Hand out, 2000. *pelatihan calon kepala sekolah*, Direktorat Sekolah Lanjutan pertama
- Syaiful Sagala, 2009. *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta.
- Ramayulis, 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005. *Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muwahid Shulhan dan Soim, 2013. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Mohammad Ali, 2007. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nanang Fattah, 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- , 2004. *Landasan manajemen pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Aedi, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- UU No.48 tahun 2008 *Tentang pendanaan Pendidikan*.